



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 188/ 446 /KEP/435.013/2024  
TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN  
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

**BUPATI SUMENEP,**

Menimbang : a. bahwa jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar merupakan suatu upaya pembinaan yang dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi, Monitoring, dan Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administarasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 48).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan Asal	Nama Satuan Pendidikan Setelah Perubahan	Alamat Lokasi
PAUD Ar Risalah	TK Negeri Banra'as Dungkek.	Jl. Raya Pelabuhan No. 17 Desa Banra'as Kec. Dungkek

- Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan kebijakan atas dampak yang ditimbulkan dari Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

- Keempat : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/367/KEP/435.013/2024 tentang Pendirian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 31 Desember 2024

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**